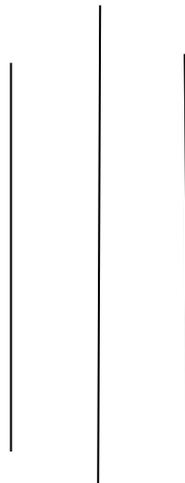




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TS 2022-2023
KE KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 17 – 21 FEBRUARI 2023**



KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan.....	3
I.3. Lokasi dan Waktu.....	4
I.4. Agenda Kunjungan.....	4
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN PERTEMUAN.....	5
II.1. Gambaran Umum.....	5
II.2. Temuan, Permasalahan dan Usulan	6
II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	10
III. PENUTUP.....	11
LAMPIRAN.....	12
Dokumentasi Kegiatan	122



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
KE KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 17 – 21 FEBRUARI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 11 Januari 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Utara;
- b. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Luwu Utara.
- c. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait dengan program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya melalui APBN.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023 tanggal 17 – 21 Februari 2023, yang dipimpin oleh **Bapak H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si (A-130/F-GERINDRA/DAPIL SULSEL II).**

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan hunian tetap masyarakat terdampak banjir bandang di Desa Radda, Kecamatan Radda;
2. Peninjauan di Bendung Baliase;
3. Peninjauan di Sungai Radda dan Sungai Masamba terkait dampak bencana banjir bandang;
4. Peninjauan Pelabuhan Munte;
5. Pertemuan dengan Bupati Luwu Utara dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI membahas terkait program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN PERTEMUAN

II.1. Gambaran Umum

- Salah satu isu strategis terkait infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan adalah penanganan banjir bandang yang pernah melanda Kabupaten Luwu Utara pada Juli 2020 Silam.
- Banjir bandang di Luwu Utara terjadi karena intensitas hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan Sungai Masamba, Sungai Rongkong dan Sungai Radda meluap dan terjadi banjir bandang. Begitu besarnya bencana tersebut, hingga kini masih dilakukan *recovery* meski sudah 2 tahun lebih berlalu.
- Kementerian PUPR melakukan langkah-langkah untuk menangani banjir tersebut, yakni membuka akses konektivitas khususnya jalan yang masih tergenang dan tertutup lumpur di Kecamatan Masamba, merelokasi warga terdampak, dan untuk penanganan permanen, dilakukan normalisasi sungai dengan pengerukan, perbaikan alur sungai dan pembuatan tanggul sungai dengan struktur permanen.
- Selain isu terkait penanganan akibat banjir bandang, diperlukan juga pengembangan Pelabuhan Munte yang berada di Desa Munte Kecamatan Tana Lili. Ide awal pembangunan Pelabuhan Munte tahun 2011 merupakan pelabuhan lokal untuk menunjang aktivitas penumpang pelabuhan Malili Kabupaten Luwu Timur dan Pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk jalur penumpang ke Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara.
- Dalam perkembangannya, seiring dengan hadirnya investor yang bergerak di sektor kelapa sawit yaitu dengan didirikannya pabrik kelapa sawit di Kab. Luwu utara dan Kab. tetangga, maka keberadaan Pelabuhan Munte menjadi pelabuhan alternatif, bukan hanya untuk transportasi penumpang, tetapi juga berfungsi sebagai transportasi kargo seperti minyak sawit mentah (CPO).
- Posisi Pelabuhan Munte sangat strategis mengingat lokasi perkebunan sangat dekat dgn Pelabuhan Munte jika dibandingkan dengan pelabuhan Malili dan Palopo. Kondisi tersebut menjadi alternatif prioritas atas pertimbangan efisiensi waktu dan biaya angkutan.

II.2. Temuan, Permasalahan dan Usulan

Beberapa temuan dan permasalahan serta usulan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023, adalah sebagai berikut:

a. Bidang PUPR

- Ditjen Sumber Daya Air

- 1) Terkait dengan penanganan pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, dibutuhkan kelanjutan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Masamba Kec. Masamba dan Sungai Radda Kec. Baebunta, serta Pembangunan Pengendali Sedimen (Sabodam) Sungai Masamba.
- 2) Perlu penataan dan pengerukan Sungai Masamba, dimana masih cukup banyak material sisa banjir dan sedimen di Sungai Masamba.
- 3) Terkait penanganan banjir, agar antisipasi banjir dalam bentuk yang permanen dapat dilakukan. Disamping itu, penyebab banjir juga perlu untuk dikaji agar dapat mengambil langkah antisipasi.
- 4) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengusulkan pembangunan Bendungan Rongkong yang dapat berfungsi sebagai pengendali banjir, sumber air irigasi, sumber air baku dan pembangkit listrik tenaga air.
 - Sungai Rongkong berpotensi mengairi persawahan kurang lebih 27.696 Ha sesuai hasil studi kelayakan Bendungan Rongkong pada tahun 2021. Saat ini potensi areal persawahan tersebut telah dikelola masyarakat seluas kurang lebih 2.500 Ha melalui beberapa Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan 3.785 Ha sawah tadah hujan.
 - Disamping potensi tersebut sungai Rongkong juga selalu mengakibatkan banjir setiap tahun yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dasar termasuk konstruksi penanggulangan banjir, jalan, jembatan, sarana ibadah, sarana pendidikan, permukiman serta lahan perkebunan dan persawahan milik masyarakat. Luapan banjir Sungai Rongkong telah membanjiri 3 kecamatan, yakni Kec. Baebunta, Kec. Baebunta Selatan, dan Kec. Malangke Barat.

- Terkait dengan *readiness criteria*, telah dilaksanakan perencanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Bendungan Rongkong serta studi *Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP)*.
- 5) Selain itu, diperlukan pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air, yakni:
- Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase;
 - Pengadaan tanah Jaringan Irigasi Baliase;
 - Pembangunan ABSAH (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan) di 7 desa;
 - Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
 - Penanganan Darurat Bencana Dampak Luapan DAS Rongkong dan DAS Baliase di Baebunta Selatan, Kec. Masamba dan Kec. Malangke Barat.
- Ditjen Perumahan
 - 1) Dengan selesainya pembangunan Perumahan Hunian Tetap bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara, diperlukan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bagi perumahan Hunian Tetap, yang terdiri dari jalan, Plat Duiker, dan drainase. Adapun lokasi pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum akan dilaksanakan pada kawasan Hunian Tetap di Kelurahan Bone Tua, Desa Sepakat, Desa Pombakka, Radda Huntara, Radda Tomakaka dan Desa Meli.
 - 2) Fasilitas umum harus segera diusulkan sehingga lebih tertata dengan baik, jangan sampai dibiarkan saja. Walaupun fasilitas umum dibangun oleh BNPB, Kementerian PUPR juga harus turut membantu.
 - 3) Pembangunan rumah susun ASN Kab. Luwu Utara.
 - 4) Bantuan Stimulan perbaikan rumah rusak untuk kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan dari data penerima Bantuan yang telah divalidasi oleh BNPB dengan rincian rumah rusak sedang 452 unit dan rumah rusak ringan 1982 unit.
 - Ditjen Bina Marga
 - 1) Saluran drainase pada Jalan Nasional di Kabupaten Luwu Utara perlu untuk diperhatikan, termasuk di Kota Masamba.
 - 2) Diperlukan percepatan pembangunan Jembatan Sungai Pikun di Kota Palopo.

- 3) Preservasi jalan pada ruas Batas Luwu – Masamba dan ruas Masamba – Batas Luwu Timur.
 - 4) Pembangunan jembatan gantung Beringin Jaya yang berlokasi di Desa Beringin Jaya, Kec. Baebunta Selatan.
 - 5) Lanjutan pelebaran Jalan Nasional dan median jalan Radda – Baliase
 - 6) Pembangunan jalan ruas Radda – Meli
 - 7) Lanjutan peningkatan jalan ruas Sabbang – Tallang – Sae (Batas Sulawesi Barat)
- Ditjen Cipta Karya
 - 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan instalasi pengolahan air untuk 6 Intake (tempat pengambilan air baku);
 - 2) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - 3) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kec. Baebunta, Kec. Sukamaju Selatan, Kec. Bone – Bone, dan Kec. Masamba;
 - 4) Program Air Minum, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 19 desa;
 - 5) Peningkatan Kualitas Sanitasi Permukiman di Kec. Baebunta, Kec. Bone – Bone, dan Kec. Tanalili.
 - 6) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kec. Sukamaju Selatan, Kec. Bone – Bone, Kec. Rongkong, Kec. Rampi, dan Kec. Seko.
 - Ditjen Bina Konstruksi
 - Agar kegiatan yang putus kontrak tidak terjadi lagi, khususnya pembangunan Jembatan Sungai Pikun di Palopo dengan memperhatikan kelayakan harga untuk kualitas yang baik.
 - Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa Seko sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru karena mempertemukan 3 provinsi, yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Butuh dukungan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR karena sangat strategis dalam rangka mendukung Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur, karena lintas utama logistik, baik itu beras, hortikultura, dan daging.

b. Bidang Perhubungan

- Ditjen Perhubungan Laut

- 1) Diperlukan pengembangan Pelabuhan Munte, antara lain penambahan panjang dermaga, perluasan terminal kargo, pembangunan sarana dan prasarana terminal penumpang, serta pembentukan syahbandara di Pelabuhan Munte. Pengembangan Pelabuhan Munte sangat penting karena memiliki efek domino bagi pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara.
- 2) Hierarki Pelabuhan Munte sesuai RIPN KP 432 tahun 2017 adalah Pelabuhan Lokal (PL). Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Munte jangka pendek, menengah dan jangka panjang tidak ada penambahan dermaga, hanya sesuai eksisting yang ada. Titik dermaga yang cukup dangkal yaitu lws \pm 4 m juga mengakibatkan kurangnya kunjungan kapal.
- 3) Oleh karena itu perlu dilakukan *review* Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan *Detail Engineering Design* (DED) terhadap Pelabuhan Munte, termasuk peningkatan status pelabuhan dari Pelabuhan Lokal (PL) menjadi Pelabuhan Pengumpul (PP) untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Munte.

- Ditjen Perhubungan Udara

- Diperlukan pembenahan baik di fasilitas sisi udara maupun fasilitas sisi darat untuk pengembangan Bandara Andi Jemma Masamba, Bandara Rampi, dan Bandara Seko. Selain itu diperlukan juga peningkatan kelas dan sarana prasarana di Bandara Lagaligo Bua Palopo.

c. Bidang Pencarian dan Pertolongan

- Jika dilihat dari Luas wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar dan standar kebutuhan personil untuk mengcover seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai masih kurang. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan personil SAR.
- Diperlukan peningkatan Infastruktur untuk pos dan unit siaga SAR;
- Perlu penyediaan kapal kecil yang bisa bergerak taktis dan bisa masuk kedalam daerah dangkal.

II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi Perumahan Hunian Tetap warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Laut agar segera melakukan *review* Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan *Detail Engineering Design* (DED) terhadap Pelabuhan Munte, termasuk peningkatan status pelabuhan dari Pelabuhan Lokal (PL) menjadi Pelabuhan Pengumpul (PP) untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Munte.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG dan Basarnas agar meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan transportasi, pengentasan daerah tertinggal, diseminasi informasi, serta kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Luwu Utara.
4. Terkait sejumlah usulan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan infrastruktur yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan mengedepankan aspek-aspek skala prioritas, akuntabilitas, dan memberikan *output* dan *outcome* yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Februari 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

KETUA TIM

ttd

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE., M.Si
No. Anggota: A-130

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan









